



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RISKAPRIAN
2. Jabatan : PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
3. NIK : 114757

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.500.000.000

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
4. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000
5. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
6. MOBIL, TOYOTA MICRO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000
7. MOTOR, HONDA CRF250 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000
8. MOTOR, HONDA CMX500AH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000
9. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5 G AT Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 450.000.000



10. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 230.000.000

11. MOBIL, TOYOTA W101RE-LYYFJ Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 92.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 117.300.133

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.609.300.133

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.609.300.133

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.